**STUDI FENOMENOLOGI SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) BORERO DESA AMPERA KECAMATAN OBA UTARA**

Sidin Usman,SE.M.Ak

Universitas Buni Hijrah Maluku Utara

Email: [sidindino59@gmail.com](mailto:sidindino59@gmail.com)

Jufri Togubu,SE.M.Si

Universitas Buni Hijrah Maluku Utara

Email: [upitogubu@gmail.com](mailto:upitogubu@gmail.com)

ABSTRAK

Untuk mengetahui Factor yang terpenting pada pengelolaan bumdes agar berjalan dengan baik dan efektif maka system pengendalian internal yang harus di terapkan diantaranya meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan minerapkan prinsip utama pengelolaan Bumdes dengan cara *kooperatif*, *partisipatif*, *emansipatif,* *transparansi*, *akuntabeliitas* , dan *sustainable*. Metodologi penelitian yang digunakan kualitatif diskriptif dengan pendekatan Fenomenologi,. Tehnik pengumpulan data yang digunakan data primer, Interview (Wawancara), Observasi, dan Dokumentasi, sampel yang digunaka Sumber data primer untuk menjawab tujuan penelitian adalah wawancara dengan sumber daya manusia dimana populasi tersebut di ambil beberapa orang pengurus BUMDes, Anggota BUMDes (pihak-pihak yang terlibat langsung dalam kegiatan BUMDes Desa Ampera Sedangkam untuk informan kunci dalam penelitian ini adalah 1) Pemerintah Desa Ampera , 2) Ketua Bumdes, 3) Sekertaris Bumdes, 4) Bendahara Bumdes,1 Anggota Bumdes dan 1 orang toko masyarakat.

**Kata Kunci**. Fenomenologi, Sistem Pengendalian Internal, pengelolaan Bumdes

**ABSTRACT**

To find out the most important factor in managing bumdes to run well and effectively, the internal control system that must be implemented includes the organizational structure, methods and measures that are coordinated to maintain organizational wealth, check the accuracy and reliability of accounting data, and encourage compliance with policies. management of Village Owned Enterprises (BUMDes) by applying the main principles of Bumdes management in a cooperative, participatory, emancipatory, transparent, accountable, and sustainable manner.The research methodology used is descriptive qualitative with a phenomenological approach. The data collection techniques used were primary data, Interview (Interview), Observation, and Documentation, the sample used. Primary data sources to answer the research objectives were interviews with human resources where the population was taken by several BUMDes administrators, BUMDes members (stakeholders). The key informants in this study were 1) Ampera Village Government, 2) Head of Bumdes, 3) Secretary of Bumdes, 4) Treasurer of Bumdes, 1 Bumdes member and 1 community shop.

**Keywords.** Phenomenology, Internal Control System, Bumdes management

**Pendahuluan**

Dalam rangka ketahanan pangan Nasional dan untuk mengurangi urbanisasi yaitu perpindahan penduduk dari desa ke kota pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Desa. pasal 4 point d bahwa peraturan Desa bertujuan mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama. Dengan adanya peraturan itu diharapkan Desa mampu mandiri mengelola asset yang dimiliki Desa. Untuk kemandirian Desa dalam pengelolaan asset Desa, pemerintah mengeluarkan peraturan lewat menteri Desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi republik Indonesia nomor 4 tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran badan usaha milik desa. dalam peraturan itu pasal 1 ayat 2 menjelaskan Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesarbesarnya kesejahteraan masyarakat Desa

Desa yang memiliki otonomi desa yang mana desa meliki hak dan kewenangan penuh untuk mengelolah dan menjalankan pemerintahannya sendiri sehingga melahirkan desa yang inovatif, kreatif dan mandiri dalam meningkatkan kemajuan maupun kesejahtraan masyarakat yang ada di desa. Sebagai daerah yang memiliki otonomi penuh, untuk menjalankan pemerintahaannya maka Desa harus harus memiliki lembaga ekonomi yang kuat, lembaga ekonomi yang dimaksud adalah Badan Usaha Miliki Desa (BUMDES). Untuk kelangsungan kegiatan bumdes tersebut harus memiliki dasar hukum yang kuat agar kegiatan dan operasional BUMDES tersebut mampuh menjalankan usahanya dengan sistem pengendalian, baik pengendalian internal maupun pengendalian eksternal. Dari segi pengelolaan Bumdes itu sendiri harus benar – benar mengacu pada sistem pengelolaan dengan mengendepankan asas transpasarnsi dan akuntabilitas, dari dua asas tersebut membuthkan sistem pengendalian internal yang matang baik pengendalian yang diakukan oleh pengurus Bumdes itu sendiri dan juga pengendalian internal yang di lajukan oleh pemerintah desa maupun pengendalian juga melibatkan pemerintah daerah setempat.

(Mulyadi, 2016) mengatakan bahwa pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga aset organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi , mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Tujuan dari sistem pengendalian internal adalah sebagai berikut: (1) menjaga aset organisasi, (2) megecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, (3) mendorong efisiensi (4) mendorong dipatuhinya kebijkan manajemen. Jadi sistem pengendalian intern sangat berperan dalam keadaan ini, dengan sistem pengendalian interan yang memadai kejadian atau keadaan yang tidak diharapkan seperti kecurangan akan sangat kecil kemungkinannya terjadi, dimana dalam memberikan suatu pengelolaan bumdes dan ada penilaian-penilaian yang memadai untuk mengurangi terjadinya resiko penyimpangan atau penyelewengan di masa yang akan datang

Di Desa Ampera kecamatan oba utara kota tidore kepualan terbentuk salah satu bumdes dengan nama bumdes “BORERO” Bumdes tersebut melakuka kegitan utama dari usaha bergerak di bidang penjualan kios pertanian dan Pengelohan tepung singkong, Permasalahan bumdes tersebut dari awal pembentukan kegaiatan pendampingan selalu dilakukan oleh pendamping desa, dan dijadikan sebagai bumdes percontohan di desa yang berada di kecamatan oba utara, akan tetapi memasuki tahun ke 2 dan ke 3 bumdes tersebut tidak lagi berjaan dengan baik , baik dari kegiatan operasional maupun kegiatan lainnya ini disebabkan sistem pengendalian internal dan pendampingan tidak lagi dilakukan oleh lembaga yang di bentuk pemerinta baik pendamping dari pemerintah desa ampera maupun pemerintah kota tiodre itu sendiri yang melekat pada Badan Pemberdayan Masyarakat Desa sehingga pengurus bumdes tersebut tidak lagi melakukan kegiatan yang semestinya dilakukan oleh pengurus bumdes yang menjadi kegiatan rutinitas setiap hari.

Penelitian tentang studi fenomenologi sistem pengendalian internal terhadap pengelolaan Bumdes, bertujuan untuk mengetahui kejadian atau kegaiatan bumdes Borero, penelitian ini dengan menggunakan pendekatan fenomenologi dengan sebuah pengalaman pengelolaan bumdes oleh pengurus Bumdes

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat ditarik suatu rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah : Bagaimana pengelolaan BUMDes di Desa Ampera Bagaimana Sistem Pengendalian internal pada BUMDes Borero di Desa Ampera

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini

1. Untuk mengetahui pengelolaan BUMDes di Desa Ampera
2. Untuk Mengetahui Sistem Pengendalian internal pada BUMDes Borero di Desa Ampera

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan sebagai bahan kajian ilmiah khususnya dalam bidang Ekonomi Akuntansi Sektor Publik, dan dapat digunakan sebagai referensi atau penelitian agar terdapat wacana yang diharapkan berubah menjadi suatu tindakan nyata untuk mensejahterakan masyarakat Dapat memberikan pengetahuan / informasi kepada masyarakat untuk memahami secara mendalam pengelolaan BUMDes, sehingga dapat menumbuhkan partisipasi masyarakat Dapat dijadikan sebagai referensi dan bahan evaluasi guna meningkatkan kinerja BUMDes, baik kepada Pemerintah desa Ampera maupun Pemerintah Kota Tidore Kepulauan.

**Kajian Teori**

Fenomenologi adalah ilmu berorientasi untuk dapat mendapatkan penjelasan tentang realitas yang tampak. Fenomena yang tampak adalah refleksi dari realitas yang tidak berdiri sendiri karena ia memiliki makna yang memerlukan penafsiran lebih lanjut. Fenomenologi menerobos fenomena untuk dapat mengetahui makna (hakikat) terdalam dari fenomena-fenomena yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari.

Fenomenologi juga berusaha memahami fenomena (konteks kehidupan) melalui situasi tertentu. (Kuswarno, 2009) mengemukakan, Tujuan utama fenomenologi yaitu untuk mempelajari bagaiman fenomena dialami dalam kesadaran, pikiran, dan tindakan, sebagaimana fenomena tersebut bernilai atau diterima secaraa stetis. Sedangkan tugas fenomenologi adalah menghubungkan antara pengetahuan ilmiah dengan pengalaman sehari-hari, dan dari kegiatan dimana pengalaman dan pengetahuan itu berasal. Dengan kata lain, berdasarkan tindakan sosial pada pengalaman, dan makna kesadaran

Pemikiran fenomenologi, yakni fenomenologi transsendental seperti yang digambarkan dalam kerja Edmund Husserl dan fenomenologi sosial yang digambarkan oleh Alfred Schutz. Menurut Deetz (Ardianto,dkk, 2007:127) dari dua garis besar tersebut (Husserl dan Schutz) terdapat tiga kesamaan yang berhubungan dengan studi komunikasi, yakni *pertama*  dan prinsip yang paling dasar dari fenomenologi – yang secara jelas dihubungkan dengan idealism Jerman – adalah bahwa pengetahuan tidak dapat ditemukan dalam pengalaman eskternal tetapi dalam diri kesadaran individu.  *Kedua,* makna adalah derivasi dari potensialitas sebuah objek atau pengalaman yang khusus dalam kehidupan pribadi. Esensinya, makna yang berawal dari suatu objek atau pengalaman akan bergantung pada latar belakang individu dan kejadian tertentu dalam hidup. *Ketiga,* kalangan fenomenolog percaya bahwa dunia dialami dan makna dibangun melalui bahasa. Ketiga dasar fenomenologi ini mempunyai perbedaan derajat signifikansi, bergantung pada aliran tertentu pemikiran fenomenologi yang akan dibahas

1. **Fenomenologi Sosial Schutz**

Dalam mempelajari dan menerapkan fenomenologi sosial ini, Schutz mengembangkan juga model tindakan manusia (*human of action)* dengan tiga dalil umum yaitu

1. *The postulate of logical consistency* (Dalil Konsistensi Logis)

Ini berarti konsistensi logis mengharuskan peneliti untuk tahu validitas tujuan penelitiannya sehingga dapat dianalisis bagaimana hubungannya dengan kenyataan kehidupan sehari-hari. Apakah bisa dipertanggungjawabkan ataukah tidak

1. *The postulate of subjective interpretation* (Dalil Interpretasi Subyektif)

Menuntut peneliti untuk memahami segala macam tindakan manusia atau pemikiran manusia dalam bentuk tindakan nyata. Maksudnya peneliti mesti memposisikan diri secara subyektif dalam penelitian agar benar-benar memahami manusia yang diteliti dalam fenomenologi social

1. *The postulate of adequacy* (Dalil Kecukupan)

Dalil ini mengamanatkan peneliti untuk membentuk konstruksi ilmiah (hasil penelitian) agar peneliti bisa memahami tindakan sosial individu. Kepatuhan terhadap dalil ini akan memastikan bahwa konstruksi sosial yang dibentuk konsisten dengan konstruksi yang ada dalam realitas social

**2 Sistem Pengendalian Internal**

Pengendalian internal sangat di butuhkan dalam menjalankan sebuah usaha dengan harapan usaha yang dijalankan menjadi *sustainable* sebagaimana yang di jelaskan oleh *American Institute of Carified Publik Accountants* (AICPA) bahwa Pengendalian internal mencakup segala rencana organisasi dan semua metode serta tindakan yang telah digunakan dalam suatu perusahaan untuk mengamankan aktivanya, mengecek keandalan dan kecermatan data akuntansi, memajukan efisiensi operasi, mendorong ketaatan pada kebijakan yang telah ditetapkan (James Hall , 2009). Lain halnya dengan Mulyadi (2016) menjelaskan bahwa sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Pengendalian intern merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan tertentu, namun pengendalian intern bukanlah suatu tujuan, tetapi merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Penjelasan ini dipertajam oleh Hartanto (1997) dalam (Mardi, 2011) bahwa pengendalian internal dengan membedakan dalam arti yang sempit, dan dalam arti yang luas. Dalam arti sempit, pengendalian internal disamakan dengan *internal check* yang merupakan mekanisme pemeriksaan ketelitian data administrasi. Akan tetapi dalam arti luas, pengendalian internal disamakan dengan *management control*, yaitu suatu sistem yang meliputi semua cara yang digunakan oleh pimpinan perusahaan untuk mengawasi dan mengendalikan perusahaan.

Jadi Pengendalian Internal merupakan suatu sistem yang meliputi struktur organisasi beserta semua mekanisme dan ukuran-ukuran yang dipatuhi bersama untuk menjaga seluruh harta kekayaan organisasi dari berbagai arah (Mardi, 2011). Hal ini diperlukan untuk mengatur dan mengarahkan aktifitas- aktifitas suatu lembaga keuangan atau perusahaan. Pengendalian internal bukanlah suatu tujuan namun berupa rangkaian tindakan bersifat pervasif dan menjadi bagian yang tidak dapat terpisahkan, bukan hanya sebagai tambahan dari infrastruktur suatu entitas namun diharapkan mampu memberikan keyakinan memadai bukan keyakinan mutlak

**3.** **Unsur sistem pengendalian internal**

Pengendalian internal harus tercipta secara kondusif seperti yang di paparkan oleh Mardi (2011) Agar suatu sistem pengendalian intenal dapat berjalan secara efektif seperti yang diharapkan, harus memiliki unsur pokok sistem pengendalian internal adalah sebagai berikut

1. Struktur Organisasi

Jadi struktur organisasi merupakan suatu pemisahan tugas antar bagian agar tidak ada rangkap jabatan

1. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan dalam organisasi

Struktur organisasi harus dilengkapi dengan uraian tugas yang mengatur hak dan wewenang masing-masing tingkatan beserta seluruh jajarannya. Jadi setiap karyawan harus tahu hak dan kewajiban serta tanggungjawab masing-masing bagian. Prosedur pencatatan yang baik menjamin ketelitian dan keandalan data dalam perusahaan

1. Pelaksanaan kerja secara sehat

Tata cara kerja secara sehat merupakan pelaksanaan yag dibuat sedemikian rupa untuk mendukung tercapainya tujuan pengendalian internal yang ditunjukkan dalam beberapa cara.Unsur kehati hatian dan *rolling* pegawai sangat penting untuk dijaga

1. Pegawai berkualitas

unsur pokok yang menjadi penggerak organisasi ialah karyawan, karyawan harus berkualitas agar organisasi memiliki citra yang berkualitas. Secara umum, kualitas karyawan ditentukan oleh 3 aspek yaitu, pendidikan, pengalaman dan akhlak. Tidak hanya berkualitas namun kesesuaian tanggung jawab dan pembagian tugas perlu diperhatikan

**4. Struktur Pengendalian Internal**

Struktur pengendalian internal yang meliputi berbagai kebijakan dan prosedur yang ditetapkan guna memberikan arah yang jelas dan benar untuk pencapaian tujuan organisasi dimasa yang akan datang. Sebagaimana yang diungkapkan (Bodnar, 2010) suatu prosedur yang dirancang untuk memastikan bahwa elemen proses pengendalian internal diimplementasikan dalam suatu sistem aplikasi tertentu di setiap siklus transaksi organisasi yaitu pengendalian pemrosesan transakasi. Pengendalian pemrosesan transakasi mencakup pengendalian umum dan pengendalian aplikasi

1. Pengendalian umum

Pengendalian umum mempengaruhi semua pemrosesan transaksi da mencakup beberapa hal (1) Perencanaan organisasi pemrosesan data. (2) Prosedur operasi secara umum. (3) Karakteristik pengendalian peralatan. (4) Pengendalian akses data dan peralatan

b, Pengendalian aplikasi

Pengendalian aplikasi merupakan pengendalian yang spesifik untuk satu aplikasi tertentu. Pengendalian aplikasi dikelompokkan menjadi dua (a) Pengendalian input, Dirancang untuk mencegah serta mendeteksi kesalahan pada tahap penginputan data. (b) Pengendalian Proses, dirancang untuk memberikan keyakinan bahwa pemrosesan telah terjadi sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dan bahwa tidak ada transaksi yang terlewat yang tidak diproses atau bahwa tidak ada transaksi tambahan yang mestinya tidak ikut diproses . (c) Pengendalian Output, pengendalian ini dirancang untuk memastikan bahwa input dan proses pengendalian yang telah dijalankan menghasilkan output yang valid dan bahwa output telah didistribusikan secara tepat

1. **Komponen Pengendalian Intenal**
2. *Internal environment*

Lingkungan internal atau budaya perusahaan, mempengaruhi cara suatu lembaga organisasi menetapkan strategi dan tujuannya, Hal ini adalah fondasi dari seluruh komponen ERM lainnya. Lingkungan internal yang lemah sering kali menghasilkan kerusakan didalam manajemen dan pengendalian risiko. Sebuah lingkungan internal mencakup

1. Filisofi Manajemen, gaya pengoperasian, dan risiko
2. Komitmen terhadap suatu integritas, nilai-nilai etis, dan kompetens
3. Pengawasan pengendalian internal oleh dewan direksi
4. Struktur organisasi
5. Metode penetapan wewenang dan tanggung jawab
6. Standart-standart sumber daya manusia yang menarik, dapat mengembangkan, dan mempertahankan individu yang kompeten
7. Pengaruh eksternal
8. Penilaian Risiko dan Respons Risiko

Tujuan manajemen penilaian resiko dan respon resiko Manajemen harus mengidentifikasi dan menganalisis risiko untuk menentukan bagaimana cara risikorisiko seharusnya dikelola. Manajemen juga harus mengidentifikasi dan menilai perubahanperubahan yang dapat secara signifikan berdampak pada sistem pengendalian internal. Menurut (Romney & Steinbart, 2014) manajemen dapat merespons risiko dengan salah satu dari dua cara

1. Mengurangi, Maksudnya adalah mengurangi segala kemungkinan dan dampak risiko dengan mengimplementasikan sistem pengendalian internal yang efektif
2. Menerima, menerima kemungkinan dan dampak risiko.

**Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)**

Lembaga bumdes memiliki pengelolaan yang baik tentunya perlu diperhatikan indikator –indikator yang menjadi variabel untuk menjacapai tujuan tertentu dimana indikator tersebut 1. memiliki Visi dan Misi , 2, sasaran dan strategi Bumdes dan yang ke 3 Manajemen Bumdes, manajemen bumdes akan menjelaskan secara mendetail pada kegiatan pengelolaan bumdes diantanya manajemen administrasi, dan Manajemen kepemimpinan dalam pengurus lembaga bumdes

Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara *kooperatif*, *partisipatif*, *emansipatif,* *transparansi*, *akuntabeliitas* , dan *sustainable*. Oleh karena itu, perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan badan usaha tersebut dapat berjalan secara efektif, efisien, profesional dan mandiri. Untuk mencapai tujuan BUMDes dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan (produktif dan konsumtif) masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola masyarakat dan Pemdes

**Prinsip Utama Pengelolaan Bumdes**

Pengelolaan BUMDes harus diljalankan dengan menggunakan   
prinsip 6 prinsip utama

1. *Kooperatif.* Semua komponen yang terlibat di lembaga Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) harus mampu melakukan membangun kerja sama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya.
2. *Partisipatif* Semua komponen yang terlibat dalam lembaga Bumdes harus bersediah secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang pada akhirnya dapat mendorong kemajuan usaha Bumdes.
3. *Emansipatif* Semua komponen yang terlibat dalam lembaga Bumdes harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan   
   agama
4. *Transpataransi* Semua aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum wajib dapat diketahui oleh masyarakat dengan muda dan terbuka
5. *Akuntabel* Semua kegiatan usaha harus dapat dipertanggungjawabkan secara tehnis maupun administratif
6. *Sustainable* Kegiatan Usaha Harus dapat dipertahankan dan dikembangkan dan juga dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah Bumdes.

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif diskriptif dengan pendekatan Fenomologi, (Kuswarno,2009:2) . secara teori Fenomenologi berasumsi bahwa orang-orang secara aktif menginterpretasi pengelaman-pengelamannya dan mencoba memahami dunia dengan pengelaman pribadinya (Littlejohn,2009:57). Fenomena yang tampak adalah refleksi dari realitas yang tidak dapat berdiri sendiri, karena ia memiliki makna yang memerlukan penafsiran yang lebih lanjut

**Gambaran Umum Tempat Penelitian**

1. **Desa Ampera**

Desa Ampera secara adminitrsi masuk pada wilayah Kecamatan Oba Utara kota tidore Kepulauan provinsi Maluku utara dengan jumah penduduk, 706 Jiwa dengan luas willayah 34 KM2 dan kepadatan penduduk 20,8 KM2, ada pun jenis kelamin desa ampere laki-kali 364, perempuan 342 dengan demikian rasio jenis kelamin 106.dan jumlah penduduk berdasarkan kepala kleuarga 197 jumah kelurga dengan rata-rata jiwa / keluarga 4. Desa Ampera Memiliki 2 dudun dan secara geografi desa ampere berbatasan dengan:

Sebela Utara berbatasan dengan Desa Bukit Durian

Sebelah Timur Berbatasan dengan Hutan Lindung

Sebelah Selatan Berbatasan dengan Desa Akekolano dan

Sebelah barat berbatasan dengan desa Sofifi

Desa ampere selain memeliki geografi, Desa ampere juga memiliki visi dan misi sebagai arah pembangunan kedepan, dengan Visi *“Mewujudkan Desa Ampera yang Maju, Estetika, Sejahtera, Rukun dan Aman”.*dengan adanya Visi ini maka dijabarakan dalam Misi

1. Mendorong semangat warga dalam membangun desa guna terwujud perubahna-perubahan kearah desa yang lebih maju dan modern dengan tidak mengesampinkan adat istiadat dan tradisi atau kearifan local
2. Menata kebersihan dan keindahan desa, sehingga desa ampera menjadi desa yang terbebas dari persoalan sampah sehingga dikenal sebagai desa yang bersih dan indah
3. Memberdayakan masyarakat lewat upaya merubah pola pikir atau pemahaman dalam semua bidang usaha, dengan cara pembinaan, pelatihan, penyuluhan kemudin didukung dengan pemberian modal usaha, sehingga tewujud upaya peningkatan kesejahteraan
4. Menciptakan kedamaian dalam lingkungan terkecil (RT DAN RW) agar tercipta kerukunan antar warga, agar timbul rasa aman dan nyaman
5. **Bimdes Borero**

Peraturan Menteri Desa, Nomor 4 tahun 2014 tentang penderian, pengurusan, dan pengelolaan dan pembubaran badan usaha milik desa (BUMDES), pasal 1 ketentuan umum menjelaskan bumdes adalah badan usahan yang seluruh atau sebahagian modalnnya dimiliki oleh Desa melalui pernyataan modal yang berasal dari kekakayaan desa yang dipisahkan ,guna mengelolah aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar besarnya kesejahtraan masyarakat desa, untuk mendapat pengakuan secara hokum maka desa mengeluarkan Peraturan Desa tentang Bumdes.

Bumdes Borere yang berada di desa ampera kecamatan oba utara kota tiodre kepulauan dibentuk dengan surat kepuutusan Kepala Desa Ampera dengan Nomor 08 Tahun 2019, dengan adanya surat keputusan ini bumdes borero memiliki dasar hokum yang termuat secara formil dalam kepetusan ini, tentunya dengan adanya surat keputusan ini dikeluarkan bumdes borore secara kelembagaan wajib menjalankan tugas dan tanggjawab sebagai lembaga ekonomi desa yang mampuh memenuhi kebutuhan kepada masyarakat dengan kegiatan ekonomi yang melibatkan seluruh masyaarakat tentunya konsep yang harus di lakukan oleh pengurus bumdes borero yaitu dengan berdpedoman pada pemberdayaan ekonomi desa, pemberdayaan ekonomi desa yang dimaksud kegiatan utama yang harus di lakukan adalah keterlibatan dan partisipasi masyarakat desa Ampera yang melihata potensi desa yang ada.

Dengan adanya terbentuk badan usaha milik desa (BUMDES BORERO) tentunya memeliki tujuan sebagaimana yang diatur pada permendes nomor 4 pasal 3 tahun 2015 tentang tujuan penderian diantaranya

1. Meningkatkan kesempatan usaha dalam memenuhi kebutuhan usaha masyarakat
2. Membantu pemerintah Desa dalam mengurangi kemiskinan dan kesenjangan demi meningkatkan kesejahtraan masyarakat desa
3. Sebagai sentral ekonomi dan meujudkan satu kesatuan ekonomi warga desa Ampera Selain bumdes wajib memeliki tujuan tentunya dibaringi dengan kepengurusan dan pengelolaan bumdes, berdasarkan permendes nomor 4 tahun 2015 tentang penderian bumdes pada pasal 7 telah mengatur tata cara pengelolaan bumdes diantaranya sebagai berikut: Bentuk Organisasi Bumdes

Bumdes desa dapat terdiri dari unit-unit usaha yang bebadan hukum

Organisasi pengelolaan Bumdes

* Penasehat
* Pengawas dan
* Pelaksana operasional

**Susunan Pengurus Bumdes Borero**

**Tabel 1.1**

**Susunan Pengurus Bumdes Borero**

**Masa Bakti 2021-2022**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pembina/Penasehat** | **Nama** | **Jabatan** |
| **Samaun Ali** | **Kepala Desa** |
| **Mansur Marsaoly** | **Sekertaris Desa** |
| **Abdul Tosofu** | **Kasi Pemerintahan** |
| **Jabir Hasan** | **Kasi kesejahtraaan** |
| **Ilham Ali** | **Kaur Perencanaa** |
| **Adam Mustari** | **Kaur Keuangan** |
| **Hardiman M.Syarif** | **Kadus I** |
| **Umar Ibrahim** | **Kadus II** |
| **Pengawas** | **Ali M.Slaeh** | **Ketua** |
| **Kamarudin daut** | **Sekertaris** |
| **Mulia M.Nur** | **Anggota** |
| **Ali Makmur** | **Anggota** |
| **Suryani Husain** | **Anggota** |
| **Pelaksana Operasional** | **Adam Ibrahim,S.Pd** | **Direktur** |
| **Sumiati Abubakar,S.Pd** | **Sekertaris** |
| **Siti Hadijah,SS** | **Bendahara** |
| **Unit Usaha Kios Pertanian** | **Sukardi Yamin** | **Ketua** |
| **Sadek Wahab** | **Sekertaris** |
| **Kartini Ibrahim** | **Bendahara** |
| **Fitria A,Mustari** | **Anggota** |
| **Faujia Safi** | **Anggota** |
|  |  |
| **Unit Usaha Tepung Singkong** | **Gamaria Abdul Rahman** | **Ketua** |
| **Yuyun Harun** | **Sekertaris** |
| **Febriyanti adam** | **Bendahara** |
| **Armawi Abdullah** | **Anggota** |
| **Umiyati Harun** | **Anggota** |
| **Asriyani Soleman** | **Anggota** |
| **Nursina Hasan** | **Anggota** |

**Sumber.SK Kepala Desa Ampera 2021**

**Diskripsi Tugas**

**a. Pembina / Penasehat**

Melakukan Koordinasi kepala semua lini pengurus baik pada pengawas maupun kepada direktur dan unit-unit usaha bumdes. Untuk, Pembina Bumdes di jabat oleh **Samaun Hi Ali** dengan tugas poko penasehat sebagai berikut:

1. Meminta penjelasan dari mengenai persoalan yang menyangku pengelolaan bumdes
2. Melendungi desa terhadap yang dapat merugikan kinerja Bumdes Borero

**b. Pengawas**

Pengawas Bumdes mempunyai tugas mengawasi semua kegiatan dan memberikan nasihat kepada pelaksana operasional atau direksi dalam menjalankan kegiatan pengelolaan usaha desa. Pengawas juga bertugas melakukan pengawasan manajemen kepada pelaksana operasional dalam melakukan pengurusan dan pengelolaan BUMDES. Pengawad bumdes borero di jabat oleh bapak **Ali M.Ssleh** Pengawas dalam melaksanakan tugas mempunyai kewenangan antara lain sebagai berikut:

1. Meminta Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksana Operasional setiap akhir tahun;
2. Meminta Laporan Rincian Neraca rugi laba dan penjelasan-penjelasan atas pelaksanaan kegiatan bumdes baik usaha yang berbada hukum privat dan tidak berbadan hukum privat
3. Pengangkatan dan Pemberhentian Pengurus /Pelaksana Operasional
4. **Direktur / Ketua**

Direktur Bumdes adalah orang yang memimpin, mengendalikan dan bertanggungjawab atas keseluruhan aktivitas Bumdes mulai dari perencanaan usaha, pelaksanaan kegiatan, manajemen dan keuangan. Direktur Bumdes Borero di jabat oleh **Bapak Adam Ibrahim ,S.Pd** Tugas Direktur BUMDes, secara umum dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Memimpin, mengelola dan mengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan unit-unit usahanya sesuai AD/ART BUMDes.
2. Merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP) Unit-Unit Usaha BUMDes;
3. Merumuskan kebijakan Operasional Pengelolaan BUMDes;
4. Melakukan pengendalian kegiatan usaha BUMDes baik internal maupun eksternal;
5. Mengangkat dan memberhentikan anggota pengelola Badan Usaha Milik Desa dengan persetujuan Komisaris/Pembina BUMDes; Mewakili BUMDes di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Bertindak atas nama lembaga Bumdes untuk mengadakan perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga dalam mengembangkan usaha dan berkoordinasi dengan komisaris;
7. Melaporkan kinerja kegiatan dan keadaan keuangan Bumdes secara berkala kepada pengawas Bumdes; dan
8. Menyusun dan melaporkan laporan kegiatan usaha dan keuangan BUMDes akhir tahun kepada kepala desa, baik itu usaha tidak berbadan hukum maupun usaha yang berbadan hukum priva
9. **Sekertaris Bumdes**

Sekertaris dengan tugas adalah melakukan kegiatan yang berhubungan dengan surat menyurat, seketaris bundes borero di jabat oleh ibu **Sumiyati Abubakar,S.Pd**  dengan tugas sebagai berikut:

* 1. Melaksanakan administrasi Perkantoran
  2. Memimpin dan mengerahkan tugas-tugas sebagai pengurus bumdes
  3. Membuat surat menyurat yang berkaitan dengan rapat pengurus bumdes dan menjadi notulensi pada saat rapat
  4. Menyusun rencana kinerja program organisasi
  5. Menghimpun dan menyusun laporan kegiatan bersama bendahara dan badan pengawas

1. **Bendahara Bumdes**

Bendahara adalah penanggung jawab atau pengurus keuangan sebuah lembaga atau perusahaan. Bendahara BUMDes Borero dijabat oleh Ibu **Siti Hadija S.Pd** Bendahara mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Melaksanakan pembukuan keuangan;
2. Menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja BUM Desa Borero
3. Menyusun laporan keuangan
4. Mengendalikan anggaran

**STRUKTUR ORGANISASI BUMDES BORERO**

**PENGAWAS**

**PEMBINA/PENASEHAT**

**PEMDES AMPERA**

**DIREKTUR BUMDES**

**BORERO**

BENDAHARA

BORERO

SEKERTARIS

BORERO

UNIT USAHA

TEPUNG SINGKONG

UNIT USAHA KIOS PERTANIAN

***Sumber.Surat Keputusan Kepala Desa Ampera 2019-2022***

**Gambaran Umum Sistem Pengendalian Internal pada Bumdes Borero**

Pengendalian Internal merupakan suatu sistem yang meliputi struktur organisasi beserta semua mekanisme dan ukuran-ukuran yang dipatuhi bersama untuk menjaga seluruh harta kekayaan organisasi dari berbagai arah dengan tujuan yang akan dicapai bersama, dimana bumdes merupakan organisasi desa yang dibentuk dengan tujuan untuk mengerakan semua sumber daya yang dimiliki. Hal yang perlu diperhatikan pada sismtem pengendalian internal sebuah lembaga organisasi yaitu struktur organisasi, system wewenang dan prosedur pencatatan dalam organisasi, pelaksanaan kerjas secara sehat, serta pegawai / SDM yang berkualitas.

Bumdes borero merupakan lembaga organisasi yang dibentuk oleh pemerintah desa, secara kelembagaan tentunya memiliki struktur oraginais sehingga menggambarkan wewenang dan tangungjawab setiap pengurus. Strutur organisasi pada bumdes borero telah menggambarkan pembagian *job diskription* ini dibuktikan pada surat keputudan Kepala Desa Ampera nomo 08 tahun 2019 yang telah memuat susunan pengurus Bumdes borero. Susunan pengurus bumdes tersebut diantaranya Pembina / penasehat, Pengawas, Pelaksana Operasonal, pengurus unit kios pertanian dan pengurus unit tepung singkong. Dengan adanya struktur yang dimiliki oleh Bumdes Borero dari sisi mengendalian internal tentunya sangat diharapkan menghasilkan system pengendalian yang baik sehingga dapat terwujud dengan tujuan yang diharpkan, akan tetapi dari hasil studi Fenomenologi yang dilihat belum menggambarkan secara jelas keterlibatan pengurus sesuai dengan jabatan yang dimiikinya.

Hasil wawancara dengan Sekertaris Desa Ampera Bapak **Mansur Marsaoly** pada hari kams tanggal 01 Oktober 2021 Mengungkapkan bahwa :

“ *kalau dilihat dari struktur yang ada memang suda jelas dari pembina /penasehat itu termasuk semuanya pemerintah desa dan pengawas sendiri juga adalah anggota BPD, tetapi selama ini untuk pengendalian internal yang kami lakukan kepada lembaga bumdes ini tidak jalan dengan baik, ini disebabkan antra Pembina dan pengawas tidak sepaham, di tambah lagi tupoksi yang di berikan juga tidak mengerti apa yang harus di lakukan, yang sering kami terima itu setiap tri wulan ada laporan dari pelaksana operasional, laporanya berupa penyetoran ke kas desa (PAD) dari hasil penjulan keuntungan unit usaha bumdes”*

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa system pengendalian internal bumdes baik koordinasi maupun komando pada level pimpinan maupun pengawas tidak berjalan secara efektif dengan baik, ini disebabkan karena yang masuk dalam struktur bumdes tersebut tidak dapat memahami tugas dan tanggunjawab masing-masing orang, hal ini dapat dilihat dengan jelas progress kegiatan bumdes borero tidak ada peningkatan secara siknifikan.

**Gambaran Umum Pengelolaan Bumdes Borero**

Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara *kooperatif*, *partisipatif*, *dan emansipatif,* dengan system Manajemen yang baik, Oleh karena itu, perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan badan usaha tersebut dapat berjalan secara efektif, efisien.

Untuk pengelolaan Bumdes Borero di kelolah langsung oleh pengurus bumde, bumdes borero memeliki 2 unit usaha dimana 2 unit usaha tersebut diantaranya Pengelolaan Tepung Tapioka yang berbahan baku dari ubi kayu dan Kios penjualan pupuk pertanian Dari dua unit usaha tersebut salah satu unit usaha yaitu pengelolaan tepung singkong

Hasil wawancara yang dilakukan pada hari senin tanggal 04 oktober 2021 dengan Bapak **Adam Ibrahim**

*“ Unitk unit usaha tepung tapioka tidak lagi melakukan kegiatan produksi dari tahun 2019 sampai sekarang ini disebabkan yang pertama pengurus yang mengelolah tepung tapioka tidak lagi aktif dikarenakan kesibukan diluar pekerjaan pribadi, yang kedua disebabkan karena terdampak covid-19 yang melanda Indonesia dan efeknya sampai ke desa2 dan yang ketiga bahan baku berupa ubi kayu tidak tersedia untuk memenuhi produksi tepung tapioka tersebut,* *Sementara untuk unit usaha kios penjualan pupuk pertanian masi berjalan sampai sekarang* “

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahawa bumdes borero dengan unit usaha tepung tapioka tidak berjalan sesuai harapan, seharusnya prinsip yang digunakan dalam pengelolaan bumdes yaitu prinsip *kooperatif*  dimana semua komponen yang terdapat dalam pengurus bumdes harus mampuh bekerja sama antara komponen demi pengembangan kelangsungan hidup unit usaha bumdes kedepan

**Pembahasan Hasil Penelitian**

Bumdes borero memliki 2 unita usaha diantaranya 1 unit usaha pengelolaan tepung tapioka dan 1 unit usaha kios penjualan pupuk organik pertanian, dari 2 unit usaha tersebut memiliki tujuan mengoptimalkan seluruh summber daya yang ada dalam bumdes borero dengan melihat potensi desa yang ada, seperti wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan bapak **adam Ibrahim** menjabat sebagai direktur Bumdes, pada hari kamis tanggal. 07 oktober 2021

“*Terbentuknya bumdes borero di desa ampere tepatnya pada tahun 2016 waktu pengurus pertama tahun 2016 s/d 2019 saya masi menjabat sebagai sekertaris bumdes’dan pada tahun 2019 s/d tahun 2022 saya diangkat oleh masyarakat sebagai direkur bumdes borero”*

Setiap penderian bumdes suda tentu memiliki dinamika yang berbeda dengan kultur dan budaya yang ada didesa tersbut, berangkat dari penderian bumdes tujuan utamanya adalah pemberdayaan dan kesejahtraan masyarakat desa

seperti wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan **bapak adam Ibrahim** menjabat sebagai direktur Bumdes, pada kamis tanggal, 07 oktober 2021

“*sebenarnya awal penderian unit usaha ini cuman 1 unit usaha saja yaitu pengelolah tepung berbahan baku singkong, tetapi berjalan tidak terlalu lama di usulkan lagi 1 unit usaha kios penjualan pupuk organik pertanian , dari 2 unit usaha ini yang masi berjalan sampai sekarang kios penjualan pupuk dan bibit tanaman pertanian.unit ini dibuat untuk menjawab kebutuahan masyarakat, karena masyarakat desa ampere 60% petani”sementara pengelolaan tepung singkong tara jalan lagi sampai sekarang*

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan pembentukan bumdes borero syarat dengan kepentingan sehingga terkesan pengusulan unit usaha juga tidak memeiliki asas demokrasi usulan dari masyarakat, ini terbukti pada 1 unit usaha tidak berjaan dengan baik, seperti seperti unit usaha pengelolaan tepung singkong sementara 1 unit usaha kios pertanian benar-benar menjadi kebutuhan masyarakat

Menderikan lembaga bumdes tentunya pembiayaan juga menjadi kebutuhan yang sangat penting, tentunya pernyataan modal perlu disiapkan oleh pemerintah desa

seperti wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan bapak **adam Ibrahim** menjabat sebagai direktur Bumdes, pada hari kamis tanggal 07 oktober 2021

*“ sejak saya menjabat sekertaris bumdes dan menjabat sebagai direktur bumdes penyataan modal yang diterima dari pemerintah desa ampere di tahun pertama sebesar Rp.150.000.000,00,- dan tahun ke2 sebesar Rp.100.000.000.00,- “*

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Informasi keuangan bertujuan memberikan informasi kepada public serta memberikan informasi yang berguna dalam pertimbangan pengambilan keputusan tersebut serta sebagai bentuk pertanggungjawaban. Selain itu juga diharapkan informasi yang didapatkan berguna dalam memonitor kegiatan apa saja yang ada di BUMDes

Pengelolaan anggaran bumdes mampuh meberikan pertanggujawaban secara kolektif dengan prinsip asas tranparansi dan pencatatan akuntansi yang baik, seperti wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan ibu **Siti Hadija** menjabat sebagai bendahara Bumdes, pada hari senin tanggal. 11 oktober 2021

“ *untuk laporan pertanggjawan yang saya buat secara kolektif masi menggunakan manual belum menggunakan aplikasi SIA BUMdes yang dari BPKP kerana sistemnya susa, setelah saya buat laporanya saya langsung serahkan kepada direktur untuk membuat pertanggjawaban kepada pemerintah desa*”

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bumdes borero telah melakukan pencatatan akuntansi maupun melakukan pertanggjawab secara kolekif pada setiap unit usaha, akan tetapi sumber daya manusia yang masuk dalam struktur bumdes harus berpendidikan dengan disiplin ilmu ekonomi akuntansi sehingga penggunaan anggaran dan pencatatan akuntansi tidak lagi menggunakan manual

Yunit selanjutnya kios pertanian seperti wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan ibu **Armawi Abdullah**  menjabat sebagai kasir penjualan Bumdes borereo pada hari rabu tanggal 13 oktober 2021

*“kalau untuk unit usaha kios penjualan pupuk organic pertanian itu tujuan awalnya untuk meberikan lapangan kerja dan pemberdayaan petani, buktinya yang pengurus yang menangani kebutuhan barang-bqrqng bisa mendapatkan pekerjaan yang baik, pengadaan barang sesuia kebutuhan masyarakat lalu kami jual kepada petani dengan harga di bawah harga pasar, keuntungan dari penjualan pupuk organik pertanian cukup lumayan untuk menetupu operasional yang lain ,seperti pembayaran honor pengurus kios pertanian”*

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan untuk unit usaha kios penjualan pupuk organic pertanian dapat memberikan dampak yang sangat besar, berupa harga barang yang di jual kepada petani bisa dibeli dengan harga murah, selain harga barang yang dijual murah, masyarakat juga terlibat langsung dari aspek pemberdayaan masyarakat,pemberdayaan yang dimaksud adalah anggota unit usaha kios penjualan pupuk organic pertanian belajar untuk mengelolah sebuah usaha dengan baik.

**Pengelolaan BUMDes Borero Desa Ampera**

Sistem pengelolaan bumdes dapat dijabarkan pada prinsip-prinsi pengeloaan bumdes, dalam buku panduan penderian bumdes telah dijelaskan 6 prinsip utama dalam pengeloaan bumdes

1. ***Kooperatif,*** dijelaskan semua komponen yang terdapat dalam bumdes harus mampuh bekerja sama antar semua komponen demi kelangsungan maupun pengembangan bumdes kedepan, Pengurus bumdes Borere belum bisa dikatakan sebagai pengurus yang kooperatif dalam menjalankan tugas yang diberikan kepadanya, sebagaiaman yang disampaikan oleh bapak **Samaun Ali** jabatan sebagai kepala desa Ampera pada hari rabu 14 oktober 2021

“*selama bumdes terbentuk kalau saya bi;ang seluruh pengurus bumdes kooperatif,akan tetapi tidak semaua aktif dikarenakan nama-nama yang masuk dalam susunan pengurus bumdes punya kesibukan diluar, hanya saja ada beberapa orang yang saja yang tetap menjalankan tanggjawabnya”*

Dari hasil wawancara tersebut diatas dapat disimpulkan bahawa pengurus bumdes borere desa ampere belum memiliki prinsip kooperatif, dengan baik, ini dapat dinilai dari sebagian pengurus yang tidak terlibat langsung pada tanggjawab sebagai pengurus, akan tetapi prinsip kooperatif telah diterapkan wawalupun belum sepenuhnya dilakukan

1. ***Partisipatif,*** Semua komponen yang terlibat dalam lembaga Bumdes harus bersediah secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang pada akhirnya dapat mendorong kemajuan usaha Bumdes. Bumdes borero di Desa ampere cukup partisipatif sebaimana yang disampaikan oleh **Bapak Adam Ibrahim** pada hari kamis tanggal 14 oktober 2021

“ *saya katakan cukup partisipatif walaupun belum semuanya terlibat langsung, seperti ada kegiatan pembangunan tempat usaha bumdes yang dibangun, sebagain pengurus yang berpartisipatif membantu baik berupa tenaga, pikiran dan waktu”*

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa bumdes borere suda mampuh berpatisipatif, walaupun belum semuanya pengurus bumdes bersikap pertisipatif, ini dapat dilihat pada fenomena yang terlihat langsung pada Rapat pengurus anggota tidak semaunya hadir dalam rapat evaluasi kinerja disetiap unit usaha.

1. ***Emansipatif,*** Semua komponen yang terlibat dalam lembaga Bumdes harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan,suku,dan agama, Pengurus bumdes borero memiliki hak dan kewajiban yang sama, hasil wawancara dengan ibu **sumiati abubakar** bendahara bumdes pada hari jum’at tanggal 15 oktober 2021

*“ dibumdes borero selama ini semau hak dan kewajiban pengurus maupun anggota yang terlibat didalamnya semuanya kami berikan berupa pembayaran honor maupun intensif yang lainnya, yang telah disepakati bersama sebelumnya, selain pembayaran honor dan intentif yang lain, kami juga tidak ada perbedaan suku ras dan agama pada pemelihan pengurus bumdes”*

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan seluruh pengurus bumdes tidak membedakan satu pengurus dengan pengurusyang lain, memiliki kedudukan yang sama dan saling menghormati satu dengan yang lain dan tidak ada diskriminasi, ini dapat dilihat pada pemelihan pengurus bumdes semuanya berkompetsis dengan baik

1. ***Transparansi,*** Semua aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum wajib dapat diketahui oleh masyarakat dengan muda dan terbuka

Hasil wawancara dengan bapak **Ibrahim Ibrahim**  pada hari senin tanggal 18 oktober 2021

*“ pak didesa ampere ini kami selalul membuat papan informasi berupa anggaran bumdes, karena pemerintah desa setiap tahun papan informasi berupa baliho dorang taru di depan kantor desa maupun depan jalan, jadi muda masyarakat dapa tau, tetapi untuk penggunaan anggaranya mungkin sadiki sulit torang dapat, karena itu yang tau hanya pengurus bumdes dengan pemerintah desa saja”*

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan pemerintah desa ampere telah memberikan informasi kepada masyarakat dengan baik sehingga masyarakat dengan muda mendapat inforamsi, hanya saja masyarakat tidak mengetahui secara detail realisasi anggaran bumdes tersebut secara mendalam, tetapi prinsip transparansi telah dilakukan walaupun semuanya belum sepenuhnya di lakukan, seperti RAB nya.

1. ***Akuntabel,***Semua kegiatan usaha harus dapat dipertanggungjawabkan secara tehnis maupun administratif , bumdes borero melakukan pertangjawaban setiap tahun sebagaimana yang telah di sampaikan bapak **Adam Mustari** Pemerintah Desa Ampera pada hari selasa Tanggal 19 oktober 2021

*“ iy kami pemerintah desa untuk bumdes berore mereka kasi laporan pertangjawan ke kami itu secara kolekif dari semua unit unsaha dan laporan dimasukan 1 tahun sekali, tapi laporan tersebut langsung saya serahkan kepada kepala desa untuk di evaluasi bersama pengawas bumdes*

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa bumdes borero telah melakukan laporan pertanggjawabab secara kolektif dari pengurus bumdes, akan tetapi laporan pertangjawaban tersebut tidak di ketahui oleh semaua masyarakat

1. ***Sustainable***Kegiatan Usaha Harus dapat dipertahankan dan dikembangkan dan juga dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah Bumdes. bumdes borero belum maksimal memberikan dorongan kepada wadah bumdes, ini dapat dilihat wawancara dengan Bapak **Adam Ibrahim** sebagai ketua Bumdes pada hari senin tanggal 18 oktober 2021

*“ iya kami punya 1 unit usaha yaitu pengelolahan tepung singkong berbahan baku ubi kayu dari awal-awal berdiri jalan, tetapi masuk tahun 2019 tidak berproduksi lagi dan sampai sekarang”*

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa bumdes borero belum maksimal untuk mempertahankan unit usahanya sehingga untuk kelangsungan hidup usaha bumdes juga tidak bisa dipertahankan kedepan, factor yang paling mendasar adalah bahan baku yang tersedia dan juga biaya operasional yang lebih besar

**Sistem Pengendalian Internal Bumdes Borero**

Sistem Pengendalian internal harus tercipta secara kondusif Mardi (2011) sistem pengendalian intenal dapat berjalan secara efektif seperti yang diharapkan, harus memiliki unsur pokok sistem pengendalian internal

1. **Struktur Organisaasi**

struktur organisasi merupakan suatu pemisahan tugas antar bagian agar tidak ada rangkap jabatan

Sistem pengendalian internal pada bumdes Borere belum berjalan secara efektif ini dilihat dari hasil wawancara peneliti dengan bapak **Adam Ibrahim** sebagai ketua Bumdes pada hari senin 18 okober 2021

*” iya pak dalam SK pengurus bumdes itu ada Pembina, pengawas, dan pelaksana operasional, tentunya suda memiliki tugas dan tanggjawab masing-masing hanya saja mereka kurang aktif palingan yang selaku aktif itu bagian pelaksana operasional saja, ini disebabkan mereka tugas sebagi guru maupun kerja kantoran”*

Dai hasil wawancara diatas dapat dsimpulkan system pengendalian internal di bumdes borero desa ampere belum mampuh memberikan system pengendalian yang baik dan efektif, dan hasil pengamatan langsung oleh peneliti melihat bahwa yang selalu melakukan aktifitas setiap hari hanya 1 dan 2 orang saja yang aktif dalam kegiatan usaha bumdes, ini merupakan fenomena yang terjadi sehingga mengakibatkan system pengendalian dari unsur struktur organisasi tidak berjalan sesuai dengan apa yang menjadi tujuan awal

1. **Sistem Wewenang dan prosdur pencatatan dalam organisasi**

Struktur organisasi harus dilengkapi dengan uraian tugas yang mengatur hak dan wewenang masing-masing tingkatan beserta seluruh jajarannya. Jadi setiap karyawan harus tahu hak dan kewajiban serta tanggungjawab masing-masing bagian. Prosedur pencatatan yang baik menjamin ketelitian dan keandalan data dalam perusahaan

Peneliti melakukan wawancara dengan ibu **Siti Hadija** bendahara bumdes pada hari rabu tanggal 20 oktober 2021

*“ kalau dibilang wewenang dan tanggjawab kami suda melaksanakan sesuai dengan tugas dan tupoksi masing-masing, seperti saya bendahara membuat laporan keuangan, seperti laporan keuangan pengeluaran maupun laporan keuangan pemasukan apa bila ada permintaan dari ketua/ direktur bumdes”*

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan system wewenang dan prosedur pencatatan dalam organisasi pada bumdes borero telah dilakukan, akan tetapi peneliti melakukan wawancara mendaam dan pengamatan langsung disekretariat bumdes system pencatatan laporan keunagan tidak menggunakan SIA BUMDES tapi menggunakan pencatatan manul

1. **Pelaksanaan kerja secara sehat**

Tata cara kerja secara sehat merupakan pelaksanaan yang dibuat sedemikian rupa untuk mendukung tercapainya tujuan pengendalian internal yang ditunjukkan dalam beberapa cara.Unsur kehati hatian dan *rolling* pegawai sangat penting untuk dijaga

Pada bagian pelaksana kerja secara sehat peneliti melakukan wawancara dengan bapak **Mansur Marsaoly** Pemerinta desa Ampera pada hari rabu tanggal 20 oktober 2021

*“ kalau untuk rolling pengurus bumdes selama ini belum kami lakukan, tetap masi berpedoman pada Surat Keputusan Kepala Desa, kalau memang harus rolling tentunya musyawarah lagi dengan masyarakat”*

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa untuk menjaga pelaksanaan kerja secara sehat dibumdes borero mampuh mengendalikan kepentingan masyarakat sehingga tidak terjadi *rolling* pada tingkat pengurus sampai pada masa akhir jabatan

1. **Pegawai berkualitas**

Unsur pokok yang menjadi penggerak organisasi ialah karyawan, karyawan harus berkualitas agar organisasi memiliki citra yang berkualitas. Secara umum, kualitas karyawan ditentukan oleh 3 aspek yaitu, pendidikan, pengalaman dan akhlak. Tidak hanya berkualitas namun kesesuaian tanggung jawab dan pembagian tugas perlu diperhatikan

Pada bagian ini pegawai berkualitas peneliti melakukan wawancara dengan 2 orang pengurus bumdes borero secara bersama –sama pada hari kamis tanggal 21 oktober 2021

* + - **Ibu Sumiyati abubakar,S.Pd**

*“ Kalau kualitas si mungkin penilaian subtif saja pak, seperti tugas saya adalah sekertaris bumdes tanggjawab saya menyiapkan administrasi baik surat menyurat mapun adminitrasi sekertariatan,*

* + - **Ibu Armawi Abdullah,SKM**

*“ Saya berikan tugas awal sebagai anggota di unit usaha tepung singkong, tapi karena unit usaha tepung singkong tidak lagi berjalan saya dipindahkan sebagai anggota pada unit usaha kios pertanian dan diberi amanah sebagai kasir penjualan”*

Dari hasil wawancara 2 orang pengurus bumdes diatas dapat disimpulkan bumdes borero telah memenuhi 3 aspek utama yaitu pendidikan , pengalaman yang melekat pada ibu sumiyati maupun ibu armawi, dan peneliti juga melakukan pengamatan langsung setiap jam kerja tempat usaha kios pertanian telah membuktikan aktifitas kegiatan usaha pada unit usaha kios pertanian berjalan dengan lancar, diantaranya penyedian barang –barang pupuk pertanian, maupun pelayanan yang ramah kepada masyarakat.

**Kesimpulan**

Sistem pengendalian internal yang dilakukan oleh bumdes Borere masi sangat sederhana. Menurut Mardi (2011) Agar suatu sistem pengendalian intenal dapat berjalan secara efektif harus memiliki 4 unsur pokok system pengendalian internal diantaranya *Struktur Organisasi*, *Sistem wewenang dan prosedur pencatatan dalam organisasi, Pelaksanaan , kerja secara sehat dan Pegawai berkualitas*. Pengelolaan bumdes yang dilakukan oleh pengurus Bumdes Borero desa ampera belum maksimal. pengelolaan bumdes yang baik, sebagaimana dijelaskan dalam buku panduan penderian bumdes mengatur 6 Prinsip utama pengelolaan bumdes diataranya : prinsip *kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel* dan *sustainable.* Dengan demikian penelitian ini dapat disimpulan sebagai berikut : Pengurus bumdes borere desa ampera harusnya mampuh melakukan pengelolaan yang melibatkan semua pengurus dan mengimplementasikan prinsip *kooperatif, partisipatif dan prinsip sustainable*  dengan adanya 3 prinsip dapat mendorong 1 unit usaha tepung singkong bisa berproduksi kembali Pengurus bumdes Borero Desa ampere belum maksimal memberikan informasi kepada masyarakat seharusnya prinsip *transparansi*  terhadap pengggunaan anggaran bisa diakses dengan muda oleh masyarakat Sistem pengendalian internal pada bumdes borero Desa Ampera belum menggambarkan system pengendalian yang efektif, seperti system pengendalian dari struktur organisasi, pada struktur organisasi pelimpahan wewenang dan tanggungjawab masing masing pengurus bumdes borero masi didominasi dengan kesibukan kerja perkantoran dan rangkap jabatan. System pengendalian internal dari pencatatan organisasi di bumdes borero melakukan pencatatan seharusnya menjamin ketelitian dan keandalan data sehingga dapat dipertanggjawabkan, ini dapat dilihat dari kegiatan pencatatan berupa laporan keuangan bumdes borero masi meenggunakan pecatatan akuntansi manual tidak menggunakan SIA Bumdes dari BPKP Dari aspek sumber daya Manusia bumdes borere belum memiliki sumber daya manusia yang berkualitsa sesuai dengan disiplin ilmu, Unsur pokok yang menjadi penggerak organisasi ialah karyawan,- karyawan harus berkualitas agar organisasi memiliki citra yang berkualitas, bukan saja dilihat dari pengalaman seseorang tetapi dilihat dari tingkat pendikan dan disiplin ilmu akuntansi

**DAFTAR PUSTAKA**

Buku panduan penderian pengelolaan Badan usaha milik desa, pusat kajian dinamikan sistem pembangunan (PKDSP) Brawijaya 2017

Donny Gahral Adian 2010. Pengantar Fenomonologi Penerbit koeskosan cetakan 1 juli 2010

Dr Darmayati M.Si, Abdul Asis Julkarnain, S.Sos M.Si, Jurnal Eksitensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam mengembangkan usaha dan ekonomi masyarakat Desa yang berdaya saing di era ekonomi Asean 2019

Edi Yusuf agungunanto ,Volume 13 Nomor 1 tahun 2016, Jurnal Pengembangan Desa Mandiri melalui pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)

Haryono Umar, Sidin Usman, Rahima Br. PurbaInternational Journal of Civil Engineering and Technology (IJCIET) 2018. “*The infulence of internal control and competence of humen Resources of Village fund Managemen and the implication the qualityof village Financial Report “*

Jumiati. 2017 Jurnal Aplikasi Bisnis Volume 17 Nomor 2 Bulan Desember tahun 2017, Studi Hermenutika Pengendalian internal Pemberian Kredit Badan Usaha Milik Desa

Jurnal Kinerja BUMDes dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Mengwi Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Ni Putu Gita Rahayu (1), Ni Wayan Supriliyani (2), I Putu Dharmanu Yudartha

PERMENDES Nomor 16 Tahun 2019. Tentang Perioritas Pembangunan Dana Desa tahun 2019

Peraturan Perundang-Undangan UU no. 23 thn 2014 tentang Pemeriintahan Daerah UU No. 6 thn 2014 tentang Desa Permendagri no 39 thn 2010 tentang BUMDes

Ratna Azis Prasetyo Jurnal See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/317088682>. Peranan Bumdes dalam pembanguna dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Pejambon Kecamatan Sumber Rejo Kabupaten Bojonegoro

Sri Mulyani. Kementrain Keuangan Republik Indonesia 2017, Buku Saku Dana Desa, Desa untuk keselamatan Rakyat